

Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku

Royhisar Martahan Simanungkalit^{*1}, Ryand Max Dewanna²

^{1, 2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

Email: royhisar@student.esaunggul.ac.id¹, rynddwanna@gmail.com²

**Corresponding Author*

Article Info

Article history:

Received: May 2026

Revised: June 2026

Accepted: July 2026

Keywords:

Motor Vehicle Tax

Motor Vehicle Transfer Tax

Motor Vehicle Fuel Tax

Local Revenue

ABSTRACT

This study aims to analyse the growth rate and contribution of Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Transfer Duty (BBNKB), and Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Maluku Province for the period 2020–2024. The method used is quantitative descriptive analysis utilising secondary data in the form of Budget Realisation Reports obtained from the Maluku Provincial Revenue Agency. The analysis was conducted by calculating the growth rates and contribution ratios of each type of tax to PAD. The results of the study indicate that the growth rates of PKB, BBNKB, PBBKB, and PAD fluctuated during the study period. The highest average growth rate was achieved by PBBKB at 13.62%, followed by PKB at 6.65%, PAD at 6.42%, and BBNKB at 2.25%. In terms of contribution, PBBKB was the largest contributor to PAD with an average contribution of 26.05%, followed by PKB at 17.70% and BBNKB at 10.62%. These findings indicate that PBBKB is the most dominant source of revenue in supporting the Provincial Own Revenue (PAD) of Maluku Province, whilst PKB acts as a relatively stable source of revenue. Therefore, the local government needs to optimise the management of local taxes through improved taxpayer compliance, strengthening the tax administration system, and utilising technology to enhance the effectiveness of tax collection in order to support fiscal autonomy and regional development.



1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen vital dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Lebih dari sekadar instrumen fiskal, PAD memiliki korelasi erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah [1]. Melalui kapasitas pendanaan internal yang memadai, pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih responsif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat [2]. Kebijakan dan tata kelola perpajakan yang tepat berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah [3]. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD harus senantiasa diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan daerah di berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal [4].

Sektor pajak daerah merupakan komponen utama PAD yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah [5],[6]. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan [7]. Optimalisasi sektor pajak penting dilakukan karena dapat memperkuat basis fiskal dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program-program publik yang dibiayai dari penerimaan pajak [8], [9].

Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi, sehingga kegiatan masyarakat dalam sektor transportasi sangat berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Tantangan geografi kepulauan ini, seperti aksesibilitas antar pulau yang terbatas dan ketergantungan pada transportasi laut serta udara, sering memengaruhi pola mobilitas dan aktivitas ekonomi. Tiga komponen pajak yang menjadi fokus dalam penelitian ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki karakteristik sebagai sumber pendapatan yang relatif stabil, berkelanjutan, dan sensitif terhadap dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Ketiga jenis pajak tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat penggunaan sarana transportasi, tetapi juga menjadi indikator penting yang menggambarkan aktivitas ekonomi daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana pola pertumbuhan dan kontribusi PKB, BBNKB, dan PBBKB terhadap PAD Provinsi Maluku selama periode 2020–2024, terutama dalam konteks perubahan pola mobilitas masyarakat, serta strategi pemerintah daerah dalam mengelola sektor perpajakan. Analisis berbasis data diperlukan untuk memberikan gambaran empiris terkait efektivitas kebijakan pemungutan serta potensi optimalisasi yang masih dapat ditingkatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai institusi pengelola penerimaan pajak daerah. Selain itu, kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi penerimaan dari ketiga jenis pajak menjadi penting untuk merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan fiskal daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan [10],[11].

Penelitian oleh [12] menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat, menemukan bahwa secara keseluruhan kontribusi tersebut kurang optimal, meskipun pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan performa yang lebih baik. Berbeda dengan [13], [14], yang meneliti kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang tinggi, sementara bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan kontribusi sedang. [15] dalam memeriksa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan tren fluktuatif dengan kriteria kontribusi yang kurang, berbanding terbalik dengan [16] yang menyoroti efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kota Solok dinilai efektif dan memberikan kontribusi baik meskipun pertumbuhannya fluktuatif.

Penelitian oleh [17] menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, menemukan tren pertumbuhan yang fluktuatif namun tetap positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian [18] yang menekankan kontribusi signifikan ketiga jenis pajak tersebut terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, [19] meneliti kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun, yang menunjukkan kontribusi positif dan signifikan dari kedua jenis pajak tersebut. [20] menganalisis dampak penerapan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan pergeseran penerimaan dari provinsi ke kabupaten/kota dengan variasi signifikan antar daerah, sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal meskipun berpotensi menimbulkan ketimpangan horizontal. Serupa dengan hal tersebut, [21] mengeksplorasi efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2017-2020, mengidentifikasi tantangan utama seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan infrastruktur Samsat, menekankan perlunya reformasi pengelolaan pajak kendaraan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah

secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi maluku pada tahun 2020-2024.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk melihat Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengukuran Laju Pertumbuhan pada penelitian ini menggunakan rumus pertumbuhan yang membandingkan selisih penerimaan pajak tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan penerimaan tahun sebelumnya [22]. Formula analisis laju pertumbuhan ditunjukkan pada rumus (1).

$$Gt = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

G_t = Laju pertumbuhan pada tahun ke- t ;

X_t = Realisasi penerimaan pada tahun ke- t ;

X_{t-1} = Realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya

Pengukuran Kontribusi menggunakan analisis rasio kontribusi yang menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah tertentu terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah [23]. Formulasi analisis kontribusi ditunjukkan pada rumus (2).

$$K = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

K = Kontribusi pajak terhadap PAD (%)

Pajak Daerah = Realisasi penerimaan PKB, BBNKB, atau PBBKB

PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diambil melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh laporan penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku. Pengambilan sampel diambil berdasarkan kriteria yaitu laporan realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, dan total PAD yang lengkap, teraudit, dan dipublikasikan pada periode tahun 2020–2024. Berdasarkan kriteria tersebut, data yang digunakan merupakan data *time series* tahunan selama 5 tahun, sehingga total data observasi berjumlah 20 sampel data (terdiri dari 3 jenis pajak dan 1 total PAD per tahun).

3. HASIL DAN ANALISIS

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PKB, BBNKB, PBBKB dan PAD

Tahun	Laju Pertumbuhan			
	PKB	BBNKB	PBBKB	PAD
2020	-1,61%	-19,59%	-2,97%	13,04%
2021	12,67%	11,96%	21,94%	0,93%
2022	11,49%	0,32%	40,35%	15,82%
2023	11,36%	7,66%	8,77%	4,20%
2024	-0,67%	10,89%	0,02%	-1,88%
Rata-rata	6,65%	2,25%	13,62%	6,42%

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Maluku selama periode 2020–2024 pada Tabel 1 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, PKB mengalami penurunan sebesar -1,61% yang mencerminkan tekanan ekonomi dan menurunnya kemampuan serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Memasuki periode 2021–2023, PKB mencatat pertumbuhan positif yang relatif stabil, masing-masing sebesar 12,67%, 11,49%, dan 11,36%.

Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi daerah yang disertai dengan perbaikan sistem pemungutan, intensifikasi penerimaan, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Namun, pada tahun 2024 pertumbuhan PKB kembali melemah menjadi -0,67%, yang mengindikasikan perlambatan ekonomi dan kemungkinan menurunnya kepatuhan sebagian wajib pajak setelah beberapa tahun pertumbuhan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan cukup signifikan pada awal periode, yaitu -19,59% pada tahun 2020, yang menggambarkan melemahnya aktivitas jual beli dan transaksi balik nama kendaraan bermotor akibat tekanan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, BBNKB mulai pulih dengan pertumbuhan 11,96% seiring meningkatnya kembali aktivitas pasar kendaraan. Meskipun pada tahun 2022 pertumbuhannya tidak banyak berubah sebesar 0,32%, BBNKB kembali menunjukkan penguatan pada tahun 2023 dan 2024 dengan pertumbuhan masing-masing 7,66% dan 10,89%. Kondisi ini menandakan bahwa ketika aktivitas ekonomi dan transaksi kendaraan meningkat, penerimaan BBNKB ikut terdorong, namun tetap sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menunjukkan perubahan yang paling signifikan. Pada tahun 2020, PBBKB mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,97%, yang mencerminkan penurunan mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan yang signifikan, masing-masing sebesar 21,94% dan 40,35%. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya aktivitas transportasi dan konsumsi energi seiring pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan PBBKB masih berlanjut namun melambat menjadi 8,77%, dan pada tahun 2024 pertumbuhannya tidak banyak berubah sebesar 0,02%, yang mengindikasikan bahwa penerimaan PBBKB mulai mencapai batas optimal pertumbuhan setelah periode pertumbuhan yang sangat kuat pada tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku juga menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif. PAD menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2020 sebesar 13,04%, melambat signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,93%, kemudian kembali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 15,82%. Pada tahun 2023 pertumbuhan PAD kembali melemah menjadi 4,20% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -1,88%. Pola ini menunjukkan bahwa kinerja PAD sangat dipengaruhi oleh fluktuasi penerimaan pajak daerah, khususnya PKB, BBNKB, dan PBBKB.

Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2020–2024, PBBKB merupakan jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh PKB, PAD, dan BBNKB. Temuan ini menegaskan bahwa PBBKB menjadi penggerak utama dinamika PAD Provinsi Maluku, sementara PKB berperan sebagai sumber penerimaan yang relatif stabil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi pertumbuhan penerimaan melalui penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan pengelolaan transportasi dan energi yang adaptif agar stabilitas fiskal daerah dapat terus terjaga.

Kontribusi PKB, BBNKB, dan PBBKB

Tabel 2. Kontribusi PKB, BBNKB, dan PBBKB

Tahun	Kontribusi		
	PKB	BBNKB	PBBKB
2020	16,09%	10,24%	19,27%
2021	17,96%	11,36%	23,29%
2022	17,28%	9,84%	28,22%
2023	18,47%	10,16%	29,46%
2024	18,70%	11,49%	30,03%
Rata-rata	17,70%	10,62%	26,05%

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku selama periode 2020–2024 pada Tabel 2 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan arah penguatan di akhir periode. Pada tahun 2020, PKB memberikan kontribusi sebesar 16,09%, yang menunjukkan bahwa sejak awal periode penelitian PKB telah menjadi salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan daerah. Pada tahun 2021, kontribusi PKB meningkat menjadi 17,96%. Pada tahun 2022, kontribusi PKB menurun menjadi 17,28%, bukan karena penurunan penerimaan PKB, melainkan akibat peningkatan PAD yang lebih besar dari sumber penerimaan lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 kontribusi PKB kembali meningkat menjadi 18,47% dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 18,70%, meskipun secara penerimaan PKB sedikit menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran PKB dalam struktur PAD tetap terjaga dan bahkan semakin kuat ketika sumber PAD lain mengalami penurunan.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD Provinsi Maluku selama periode penelitian menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung menguat di akhir periode. Pada tahun 2020, BBNKB memberikan kontribusi sebesar 10,24%. Kontribusi ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,36%, yang mencerminkan mulai pulihnya aktivitas jual beli dan balik nama kendaraan bermotor. Namun, pada tahun 2022 kontribusi BBNKB menurun menjadi 9,84%, meskipun penerimaan meningkat, karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan berlangsung lebih cepat. Pada tahun 2023, kontribusi BBNKB kembali meningkat menjadi 10,16%, dan pada tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 11,49%. Peningkatan kontribusi di akhir periode ini menunjukkan bahwa peran BBNKB dalam menopang PAD kembali menguat seiring meningkatnya aktivitas transaksi kendaraan bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menunjukkan peran yang paling dominan sebagai penyumbang PAD Provinsi Maluku selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, kontribusi PBBKB tercatat sebesar 19,27%, yang berarti hampir seperlima penerimaan daerah berasal dari pajak ini. Kontribusi PBBKB terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 23,29% dan mengalami penguatan yang sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 28,22%, seiring meningkatnya konsumsi bahan bakar dan mobilitas masyarakat. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 29,46% dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 30,03%. Kenaikan persentase kontribusi pada saat PAD mengalami penurunan menunjukkan bahwa PBBKB relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi ekonomi dibanding sumber PAD lainnya dan tetap menjadi penopang utama penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata kontribusi selama periode 2020–2024, PBBKB merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD Provinsi Maluku dengan kontribusi rata-rata sebesar 26,05%, diikuti oleh PKB sebesar 17,70% dan BBNKB sebesar 10,62%. Temuan ini menegaskan bahwa struktur PAD Provinsi Maluku sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor, khususnya PBBKB sebagai kontributor utama dan PKB sebagai sumber penerimaan yang relatif stabil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui penguatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pengawasan, serta kebijakan fiskal yang adaptif agar kontribusi terhadap PAD dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

DISKUSI

Peran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Asli Daerah (PAD)

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Maka H1 diterima, hal ini menunjukkan dari kecenderungan kenaikan kontribusi PKB dari 16,09% pada tahun 2020 menjadi 18,70% pada tahun 2024 meskipun laju pertumbuhannya sempat mengalami penurunan pada awal dan akhir periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi PKB berkontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah, sehingga PKB dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting PAD Provinsi Maluku. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [6] yang dengan pendekatan deskriptif menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Maluku tetap tinggi dan stabil meskipun terjadi tekanan ekonomi. [18] menemukan bahwa pajak daerah, termasuk PKB, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Peran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) berperan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Maka H2 diterima, meskipun kontribusinya berada di bawah PKB dan PBBKB. Kontribusi BBNKB terhadap PAD meningkat dari 10,24% pada tahun 2020 menjadi sekitar 11,49% pada tahun 2024 dengan tren yang cenderung mengikuti dinamika aktivitas jual beli kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika transaksi kendaraan meningkat dan proses administrasi balik nama berjalan efektif, penerimaan BBNKB turut menguat dan menambah ruang fiskal bagi pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan [12] menunjukkan bahwa BBNKB memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dan dikategorikan cukup berkontribusi. Selain itu, [19] juga menyimpulkan bahwa kontribusi BBNKB terhadap PAD cukup signifikan, sehingga masih memiliki potensi untuk dioptimalkan melalui peningkatan pertumbuhan penerimaannya.

Peran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berperan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Maka H3 diterima, hal ini terlihat dari dari perannya sebagai penyumbang terbesar dengan kontribusi yang meningkat dari 19,27% pada tahun 2020 menjadi 30,03% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut bersamaan dengan kenaikan penerimaan PBBKB pada 2021–2022 dan tingginya realisasi sampai 2024, sehingga setiap perubahan PBBKB berdampak langsung pada fluktuasi PAD selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan PAD terhadap aktivitas konsumsi bahan bakar dan mobilitas ekonomi di Provinsi Maluku cukup besar.

Temuan ini sejalan dengan [11] menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). [20] menemukan bahwa kontribusi PBBKB memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, menunjukkan bahwa kontribusi PBBKB yang cukup besar dan secara konsisten memberikan sumbangan yang berarti terhadap PAD. Kondisi ini menegaskan bahwa PBBKB merupakan salah satu komponen pajak daerah yang strategis dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh dinamika penerimaan pajak daerah, khususnya pajak yang berkaitan dengan sektor transportasi. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dan menjadi penopang utama PAD, sehingga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Maluku masih cukup bergantung pada tingkat konsumsi bahan bakar serta mobilitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbukti menjadi sumber penerimaan yang relatif stabil dan konsisten dalam mendukung PAD, sehingga berperan sebagai basis penerimaan daerah yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan aktivitas jual beli dan transaksi kendaraan bermotor, sehingga kontribusinya cenderung mengikuti kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan PAD tidak hanya perlu difokuskan pada optimalisasi penerimaan PBBKB sebagai kontributor utama, tetapi juga pada penguatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta pengembangan sumber-sumber PAD lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis pajak tertentu. Dengan demikian, struktur penerimaan daerah dapat menjadi lebih seimbang, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian fiskal Provinsi Maluku.

REFERENCES

- [1] Mapparenta, "Contribution of Regional Original Revenue to Regional Revenue and Expenditure Budget," vol. 1, no. 33, pp. 36–50, 2022.

- [2] J. S. Winarto and F. F. Hanifah, "Strategi Optimalisasi Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Keuangan di Kota Pekalongan," vol. 8, no. 1, pp. 44–58, 2025.
- [3] W. Agustiniingsih, E. Purwaningsih, Hermanto, M. Indrati, and G. Riski, "The Effect of Tax Expenses , Tunneling Incentives , and Level of Debt on Transfer Pricing," vol. 7, no. 1, pp. 1–14, 2022.
- [4] Dalisawintri, H. M. Noor, and B. Irawan, *Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)*. Nas Media Pustaka, 2025.
- [5] A. N. Bahasoan, A. I. Anwar, M. N. J. Lekas, and R. Arsyad, "Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Literature Review," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 8, no. 1, pp. 43–46, 2024, doi: 10.33087/ekonomis.v8i1.1119.
- [6] J. Kamala, S. A. Salsa, N. Nurilawati, and W. Pangestoeti, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," *J. Ilm. Ekon. dan Manaj.*, vol. 3, no. 7, pp. 120–128, 2025.
- [7] J. Kamala, S. A. Salsa, Nurilawati, and W. Pangestoeti, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," vol. 3, no. 7, pp. 120–128, 2025.
- [8] S. A. Waisapy and T. M. Nussy, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *J. Adm. Terap.*, vol. 3, no. 2, pp. 482–487, 2024.
- [9] M. Miswar, P. Y. Lianda, and R. D. Priantana, "Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh," *J. Mhs. Akunt. SAMUDRA*, vol. 2, no. 3, pp. 153–169, 2021.
- [10] Y. Pane, A. M. Simarmata, S. Rezeki, M. Rinaldi, and F. Y. Panggabean, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Yonson," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 5, no. 2, pp. 212–225, 2021.
- [11] R. R. Prana, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi," *J. Ilman*, vol. 4, no. 1, pp. 74–86, 2016.
- [12] Karundeng and Yuanitha, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan," *J. Basicedu*, vol. 6, no. 4, pp. 7637–7643, 2023.
- [13] D. N. Safitri, "Kontribusi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)," *Sustainable*, vol. 1, no. 1, p. 144, 2021, doi: 10.30651/stb.v1i1.9762.
- [14] D. Islami and L. Rahmawati, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017," vol. 4, no. 2, pp. 169–179, 2020.
- [15] R. V. Ipu, H. Karamoy, and W. D. Kindangen, "Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud," *J. LPPM Bid. EkoSosBudKum (Ekonomi, Sos. Budaya, dan Hukum)*, vol. 5, no. 2, pp. 827–836, 2022.
- [16] Y. Kornella, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok*, vol. 14, no. 1. 2021.
- [17] R. F. Altrio and B. Saad, "Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi Pkb, Pbbkb Dan Bbnkb Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Terhadap Pada Jawa Barat Dan Dki Jakarta Periode Tahun 2015-2019)," pp. 469–478, 2023.
- [18] A. Prasiwi, M. Z. Faradhila, Gladys Lhexya Dewi, and A. Z. P. Rahmandhani, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024," *J. Ilm. Ekon. Akuntansi, dan Pajak*, vol. 2, no. 2, pp. 292–303, 2025.
- [19] W. Suratman, E. Rosmanidar, and Y. Safitri, "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020," *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 139–154, 2023, doi: 10.55606/jumia.v1i1.1132.
- [20] A. Fitriana, "Analysis of the Impact of Motor Vehicle Tax Collection Option on Regional Revenue," vol. 12, no. 6, pp. 2213–2220, 2024, doi: 10.37641/jimkes.v12i6.2899.
- [21] Y. B. Marewa, L. Lumentut, and M. Gandi, *The Effectiveness of Motor Vehicle Tax*. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-93-0.
- [22] N. A. Mantika and Wahyunadi, "Perbandingan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Seluruh Kabupaten / Kota Provinsi NTB," vol. 5, no. 1, pp. 255–263, 2024.

-
- [23] L. B. Gurusinga, F. Handayani, and Y. S. Zai, "Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota / Kab di Wilayah Sumut," vol. 4, no. September, 2025.
- [24] G. Heriyanto and Y. S. Rioni, "Economics and Digital Business Review Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan," vol. 7, no. 1, pp. 347–356, 2025.
- [25] M. Amin, "Analisis potensi dan kinerja penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di provinsi nusa tenggara barat," vol. 10, no. 1, pp. 183–190, 2022.